

# KERABAT

*Setuju Dalam Nuansa Perbedaan*

## Peningkatan **KOMPETENSI** dan Pengembangan **KARAKTER ASN**



9 772477 565009

Edisi 87  
Catur Wulan II 2019

# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

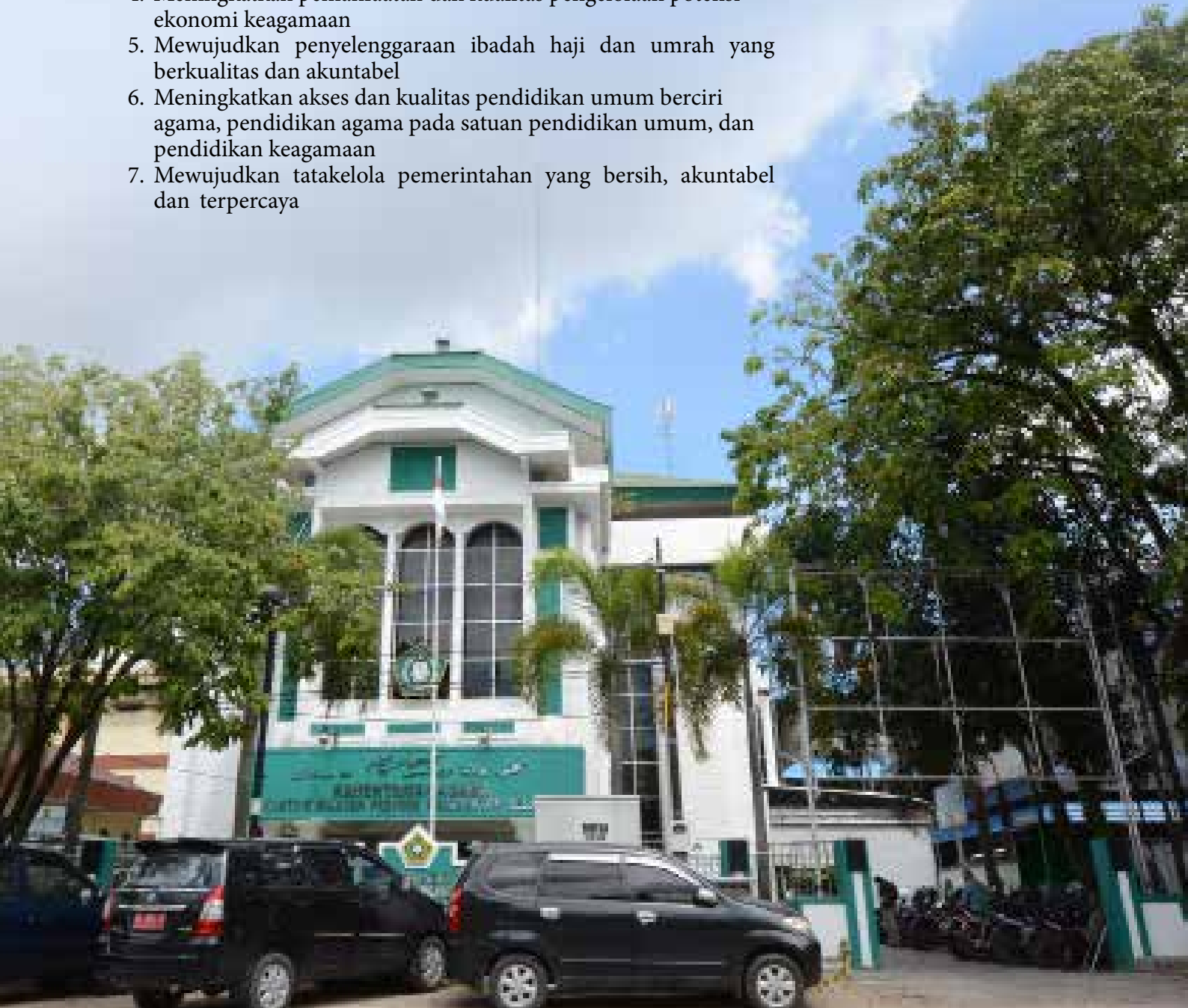
## Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

### Visi

"Terwujudnya Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

### Misi

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan
7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya





Institusi/  
lembaga

pemerintah sebagai salah satu bentuk organisasi agar mampu mencapai keberhasilan sangat tergantung kepada sumber daya manusianya. Dalam hal ini “aparatur” yang mewakilinya yang tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan. sebagai dasar meningkatkan kualitas sumber daya dan peningkatan kinerja SDM dalam menghadapi persaingan global. Dalam kaitan ini, salah satu aspek (indikator) keberhasilan suatu organisasi pemerintah yakni kelancaran pelayanan di sektor publik hingga saat ini belum sepenuhnya

dirasakan oleh masyarakat luas. Dengan adanya Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diharapkan mampu memperbaiki manajemen pemerintahan yang beorientasi pada pelayanan publik sebab PNS tidak lagi berorientasi melayani atasannya, melainkan masyarakat

Oleh karena itu, sebagai Sumber Daya Manusia yang handal dalam melaksanakan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mampu menjalankan revolusi mental dengan mendasari tuntunan kehidupan beragama secara benar, selalu memiliki komitmen dalam melayani masyarakat sehingga tercipta good governance .Di setiap organisasi akan bisa dicapai melalui kesadaran diri ASN yang mempunyai etos kerja yang baik sudah barang tentu akan menghasilkan kinerja yang baik, sehingga akan didapatkan

ASN yang professional.

Di sisi lain, ASN dalam menjalankan revolusi mental harus membentengi dengan cara mewarisi nilai –nilai kepahlawanan kemerdekaan para pendahulu kita ditambah nilai- nilai moral dengan menjalankan/mengamalkan kehidupan beragama secara konsisten.

Menurut Drs. H. Taufiq Efendi, MBA bahwa aspek pendidikan dan pelatihan menjadi sangat utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sekaligus sebagai proses investasi jangka panjang, tentang permasalahan dan peningkatan kinerja SDM aparatur Negara menghadapi persaingan global, bahwa reformasi aparatur dilaksanakan secara terus- menerus dengan ditopang oleh motivasi untuk mencari cara yang lebih efektif dan efisien.(Efendi,2008)

## REDAKSI Kerabat

PEMBINA : Drs. H. Noor Fahmi, MM  
PENANGGUNG JAWAB : Drs. H. Muslim, M.Pd.I  
REDAKTUR : H. Ahmad Kamal, S.HI, M.Ag  
PENYUNTING/EDITOR : Badariyah, S.Ag,  
DESAIN GRAFIS/LAYOUT : Rajudin, S.AP  
SEKRETARIAT  
(Pengumpul Bahan/Artikel):  
Jain Rahman, S.Kom, Marianti, SEI  
(Dokumen) :Rahma Widiyawati, SE  
(Editing) Nur Shadrina Maulidina, Eka Susana, SE  
(Distribusi) Rhoma Wijaya, SH.I  
Akhmad Ramadhan, S.Kom

Ijin Terbit:  
SK. Menpan RI No 1958/DITJEN BPG/SPP/1993  
Tanggal 27 Desember 1993  
Penerbit : Sub. Bagian Informasi dan Humas  
Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Kalimantan Selatan  
Jl. D.I. Panjaitan No. 19 Banjarmasin  
Telp. (0511) 3353472 / 085245677171  
Email : kanwilkalsel@kemenag.go.id





Seperti permainan ini, diperlukan kerjasama, konsentrasi kehati-hatian dan kedisiplinan dalam melangkah untuk mencapai tujuan bersama.

Seperti itu juga hendaknya sikap kita dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN agar dapat bekerja dan memberikan pelayanan yang terbaik baik dan sesuai dengan tujuan.



|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Cover .....               | 01      |
| Editorial / Redaksi ..... | 03      |
| Daftar Isi .....          | 06 - 07 |
| Topik Utama .....         | 08 - 29 |
| FOTO KERABAT .....        | 30 - 31 |
| BERITA NASIONAL .....     | 32 - 37 |
| BERITA PROVINSI .....     | 38 - 39 |
| BERITA DAERAH .....       | 40 - 51 |
| COVER BELAKANG .....      | 52      |



**Foto Bersama  
Peserta Peningkatan Karakter ASN  
Dilingkungan Kanwil Kemenag Kalsel**



SMART ASN : Berkompetensi dan Berkarakter

8

H. NOOR FAHMI  
Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Selatan



Penguatan Karakter ASN  
dengan Peningkatan Kompetensi

12

H. Muslim  
Kabag TU Kanwil Kemenag Kalsel



Mengenal Karakter ASN Menurut Ajaran Hindu

15

Made Budiarse  
Pelaksana Bimas Hindu Kanwil Kemenag Kalsel



ASN Menyongsong Era 4.0

18

H. Najwan Noor  
Kasubbag Organisasi Tata Laksana dan Kepegawaian



Pengembangan ASN  
Untuk Penyempurnaan Administrasi  
Barang Milik Negara

22

H. Said Muhdari  
Kasubbag Umum Kanwil Kemenag Kalsel



Aparatur Kementerian Agama  
Setia dan Taat Dengan NKRI

24

H. Mukhlis Ridhani  
Kasubbag Hukum dan Kerukunan Umat Beragama



Transformasi Karakter Humas

26

Rajudin  
Pranata Humas Subbag Inmas KANwil Kemenag Kalsel

# SMART ASN : Berkompetensi dan Berkarakter

Oleh : H. Noor Fahmi



**A**paratur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah (Tenaga Kontrak). Pegawai ASN terdiri dari pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai ASN berfungsi

sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan

dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance) serta mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif dan berkualitas tentunya perlu didukung adanya Pegawai ASN yang profesional, bertanggung jawab, adil, jujur dan kompeten dalam bidangnya. Dengan kata lain, Pegawai ASN dalam menjalankan tugas tentunya harus berdasarkan

pada profesionalisme dan kompetensi sesuai kualifikasi bidang ilmu yang dimilikinya. Untuk mewujudkan SDM aparatur (Pegawai ASN) yang profesional dan berkompotensi tinggi ini, diantaranya ditunjukkan dengan pentingnya pembinaan karier Pegawai ASN yang dilaksanakan atas dasar perpaduan antara sistem prestasi kerja dan karier. Untuk itu maka pengembangan Pegawai ASN berbasis kompetensi merupakan suatu keharusan dan perlu didukung pula dengan karakter yang tangguh, agar organisasi (birokrasi) dapat mewujudkan kinerja lebih baik dan memberikan pelayanan publik yang prima.

### **Pengertian Kompetensi**

Menurut Palan (2014) mengungkapkan competency (kompetensi) merupakan deskripsi mengenai perilaku, sementara competence (kecakapan) sebagai deskripsi tugas atau hasil pekerjaan. Dengan demikian kompetensi

merujuk kepada karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul (superior performer). Kompetensi terdiri dari beberapa jenis karakteristik yang berbeda yang mendorong perilaku. Fondasi karakteristik ini terbukti dalam cara seseorang berperilaku di tempat kerja. Kompetensi adalah mengenai orang seperti apa dan apa yang dapat mereka lakukan, bukan apa yang mungkin mereka lakukan. Selanjutnya ditegaskan bahwa inti manajemen kepegawaian lebih berorientasi pada profesionalisme Pegawai ASN, yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur, berkompotensi, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Kamus Kompetensi (LOMA, 1998), kompetensi

didefinisikan sebagai aspek pribadi dan seorang karyawan yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja yang superior. Aspek-aspek pribadi ini termasuk sifat, motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan kompetensi akan mengarahkan tingkah laku, sedangkan tingkah laku akan menghasilkan kinerja (Lasmahadi, 2008). Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua aspek pribadi dari seseorang Pegawai ASN itu merupakan kompetensi. Hanya aspek-aspek pribadi yang mendorong diri Pegawai ASN untuk mencapai kinerja tinggi, yang merupakan pencerminan kompetensi yang dimilikinya. Selain itu, juga dapat disimpulkan bahwa kompetensi akan selalu terkait dengan kinerja, sehingga kompetensi Pegawai ASN tersebut adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai ASN berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku yang diperlukan



Menurut Kamus Kompetensi (LOMA, 1998), kompetensi didefinisikan sebagai aspek pribadi dan seorang karyawan yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja yang superior.

Aspek-aspek pribadi ini termasuk sifat, motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan kompetensi akan mengarahkan tingkah laku,

dalam pelaksanaan tugas jabatannya (Suprpto, 2002).

Secara general kompetensi Pegawai ASN sendiri dapat dipahami sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (skill), atribut personal, dan pengetahuan (knowledge) yang tercermin melalui perilaku kinerja (job behavior) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi.

Selain itu, Dharma (2002) juga merangkum pendapat beberapa ahli, tentang komponen kompetensi. Menurutnya terdapat lima karakteristik komponen kompetensi, yaitu:

- 1) Motives, adalah sesuatu dimana seseorang secara konsisten berpikir sehingga ia melakukan tindakan;
- 2) Traits, adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespons sesuatu dengan cara-cara tertentu;
- 3) Self concept, adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang;
- 4) Knowledge, adalah informasi yang dimiliki seseorang, untuk bidang tertentu;
- 5) Skill, adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental.

Sedangkan menurut Prayitno (2004) komponen kompetensi profesional dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:

- 1) Kemampuan spesialis, meliputi kemampuan keterampilan dan pengetahuan, menggunakan perkakas dan peralatan dengan sempurna, serta mengorganisasikan

dan menangani masalah;

- 2) Kemampuan metodik, meliputi kemampuan mengumpulkan dan menganalisis informasi, mengevaluasi, orientasi tujuan kerja, bekerja secara sistematis;
- 3) Kemampuan sosial, meliputi kemampuan untuk berkomunikasi, bekerja kelompok dan bekerja sama;
- 4) Kemampuan individu, meliputi kemampuan untuk inisiatif, dipercaya, motivasi dan kreatif.

### Pengertian Karakter

Kata Karakter merupakan istilah kata yang berasal dari Bahasa Latin yaitu 'kharassein', 'kharakter', 'kharax' yang memiliki pengertian membuat tajam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian karakter adalah tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Sedangkan di dalam Kamus Sosiologi, pengertian karakter adalah ciri khusus dari struktur dasar kepribadian seseorang (watak). Karakter seseorang tidaklah terbentuk

dengan sendirinya namun terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter ini. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi karakter :

#### 1. Faktor Biologis

Pengaruh faktor biologis merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri dan juga berasal dari faktor keturunan atau bawaan sejak lahir.

#### 2. Faktor lingkungan

Selain dari faktor biologis, karakter juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti lingkungan hidup, pendidikan, kondisi masyarakat dan juga semua faktor eksternal yang memiliki dampak terhadap pembentukan karakter. Adat istiadat yang berlaku dan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari juga bisa untuk mempengaruhi karakter seseorang. Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam pembentukan karakter seseorang melalui pembiasaan dan contoh nyata. Berdasarkan dari dua faktor diatas maka



karakter seseorang dapat terbentuk dari dua sisi yaitu dari kekuatan dalam diri sendiri (faktor biologis) dan juga kekuatan dari luar (faktor lingkungan).

Jika ada pertanyaan lebih memilih mana antara kompetensi atau karakter, maka karakter yang lebih utama. Karena karakter seorang ASN tidak bisa diciptakan dalam jangka waktu singkat seperti halnya kompetensi. Karakter utama seorang ASN sangat dibutuhkan dalam mewujudkan ASN yang berdaya saing global. Sedikitnya terdapat empat karakter yang harus dimiliki seorang ASN. Pertama, dalam menghadapi tantangan unprecedented change (perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya) dibutuhkan karakter inovatif dan kreatif. Kedua, situasi global and fierce competition (global dan persaingan ketat) memerlukan karakter seorang ASN berupa agility and flexibility (lincah dan fleksibel). Ketiga, situasi berupa complexity and uncertainty (kompleks dan penuh ketidakpastian) menuntut seorang ASN memiliki karakter berupa persistence and perseverance (kegigihan dan ketekunan). Dan Keempat, dalam menjawab tantangan effectiveness dan efficiency, karakter yang dibutuhkan berupa teamwork and cooperation (kerja tim dan kerja sama).

Sebagai langkah percepatan penataan ASN yang memiliki kompetensi dan berkarakter, implementasi comprehensive assessment untuk mengetahui kapasitas dan kompetensi setiap aparatur negara dinilai penting dilakukan. Percepatan penataan ASN yang didesain pemerintah dilakukan dengan membagi

seluruh ASN kedalam 4 kuadran berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja.

Kuadran 1, ASN yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai, serta berkinerja baik. ASN dalam kuadran ini perlu dipertahankan dan siap dipromosikan.

Kuadran 2, ASN yang kurang kompeten dan kurang memenuhi kualifikasi, tetapi berkinerja baik. ASN dalam kuadran ini akan dilakukan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan latihan.

Kuadran 3, ASN yang memiliki kompetensi dan kesesuaian kualifikasi namun tidak mampu menunjukkan kinerja. Langkah yang dilakukan adalah melakukan rotasi atau mutasi, dan ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasinya.

Kuadran 4, ASN yang tidak memiliki kompetensi, tidak sesuai dengan kualifikasi, dan tidak berkinerja. ASN pada kuadran ini dapat dievaluasi untuk dirasionalisasi.

di era globalisasi merupakan tuntutan publik dan target yang harus dicapai. Tiga sasaran utama untuk mewujudkan SMART ASN, yaitu: Pertama, Perencanaan ASN, dengan membuka formasi/ kualifikasi ASN yang sesuai dengan arah pembangunan nasional serta potensi daerah. Kedua, Pengadaan ASN yang transparan, objektif dan fairness untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat sekaligus menjaring putra-putri terbaik bangsa. Ketiga, Meningkatkan profesionalisme, yakni meningkatkan kompetensi, kualifikasi dan kinerja sebagaimana yang diamanatkan UU ASN. Semoga dengan adanya penataan ASN tersebut diharapkan membawa sebuah optimisme bahwa ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat mewujudkan aparatur negara yang profesional, berintegritas, berkarakter dan memiliki budaya melayani guna mewujudkan tata kelola pemerintahan berkelas dunia dan memiliki daya saing.

### PETA KUADRAN KUALIFIKASI - KOMPETENSI & KINERJA PEGAWAI

|                                      | TIDAK BERKINERJA                                                                                   | BERKINERJA                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| KUALIFIKASI - KOMPETENSI SESUI       | <b>3</b><br>Kompetensi dan Kualifikasi Sesuai Namun Tidak Bekerja<br><b>ROTASI / MUTASI</b>        | <b>1</b><br>Kompeten, Kualifikasi Sesuai dan Berkinerja<br><b>SIAP PROMOSI</b>              |
| KUALIFIKASI - KOMPETENSI TIDAK SESUI | <b>4</b><br>Tidak Kompetensi, Kualifikasi Tidak Sesuai Serta Tidak Bekerja<br><b>RASIONALISASI</b> | <b>2</b><br>Kompetensi dan Kualifikasi Tidak Sesuai Namun Berkinerja<br><b>SIAP PROMOSI</b> |

# Penguatan Karakter ASN dengan Peningkatan Kompetensi

Oleh : H. Muslim



Sejak Indonesia merdeka, para pendiri bangsa sudah mencaangkan pembangunan karakter, yang oleh Soekarno diistilahkan dengan character building. Hal ini tercermin pula dari lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan WR Soepratman yang dinyanyikan pertama kali pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, melalui kalimat:... bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya...

Membangun jiwa ternyata harus didahulukan daripada membangun badan, membangun mental lebih diprioritaskan daripada membangun fisik.

Namun ketika masa orde baru, antara kedua aspek pembangunan ini tidaklah lagi yang satu lebih penting daripada yang lain, melainkan disejajarkan dan disinergikan, sehingga ketika itu sering kita dengar istilah pembangunan fisik-material dan pembangunan mental spiritual yang diucapkan oleh para tokoh dan pejabat negara dalam sambutan dan ceramahnya.

Dalam perspektif agama Islam, pembangunan jiwa, karakter, tidak lain adalah pendidikan akhlak, yang merupakan salah satu inti dari ajaran Islam. Bahkan kedatangan Rasulullah Muhammad SAW ke dunia

ini adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia supaya menjadi mulia.

Karakter atau akhlak yang terpuji sangat penting, baik bagi manusia perorangan, masyarakat bahkan juga bagi suatu bangsa dan negara. Penyair Arab-Mesir Ahmad Syauqi Bey mengatakan, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat, wa in humu zahabat akhlaquhum zahabu (suatu bangsa dikenal karena akhlaknya, jika akhlaknya runtuh maka runtuh pulalah bangsa itu).

## Krisis Karakter

Bangsa Indonesia baru

saja merayakan tahun kemerdekaannya yang ke-74, sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tentu banyak kemajuan yang telah dicapai, terutama di segi pembangunan fisik-material, meskipun di sana sini masih banyak kekurangan dan belum terwujud pemerataan kesejahteraan, belum terwujud keadilan dan kemakmuran sebagaimana dikehendaki oleh para pendiri bangsa.

Namun satu hal yang sering diprihatinkan oleh para tokoh dan ulama adalah terjadinya krisis karakter pada bangsa ini. Krisis itu ditandai dengan beratnya tantangan untuk menegakkan kebenaran, merosotnya kejujuran, sering terabaikannya amanah, berkurangnya rasa syukur ketika mendapatkan nikmat dan lemahnya kesabaran ketika menghadapi ujian. Terjadi banyak praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, jual beli dan penyalahgunaan jabatan, penegakkan hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, terjadi banyak hipokrisi atau kemunafikan karena silau terhadap harta dan kedudukan,

serta lemahnya pelayanan terhadap masyarakat. Apabila dicari benang merah, maka itu semua seringkali terjadi karena lemahnya karakter, lemahnya akhlak dan kurangnya jiwa agama dalam diri orang dan masyarakat, lebih khusus kalangan aparatur sipil negara yang mengemban jabatan-jabatan publik.

Semua krisis karakter tersebut tentu harus dikendalikan dan diatasi, sebab kalau tidak maka akan terjadi apa yang dikhawatirkan oleh Ahmad Syauqi Bey, suatu bangsa akan runtuh dan kehilangan eksistensinya sebagai bangsa, kalah dalam persaingan global dan diremehkan oleh bangsa atau negara lain.

### Peran ASN

Kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di instansi-instansi pemerintah, khususnya Kementerian Agama dalam berbagai jajarannya, mengemban tugas utama dalam pembangunan karakter ini serta pencegahan terjadinya kemerosotan karakter bangsa.

Hal ini karena Kementerian Agama identik dengan kementerian yang mengurus soal-soal keislaman, di mana soal karakter atau akhlak merupakan bagian yang tidak terpisahkan darinya.

Berkenaan dengan hal ini ada beberapa hal yang perlu diupayakan, dengan mengacu kepada sifat-sifat profetik yang dimiliki dan diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertama, perlu ditanamkan etos kejujuran sejak awal. Maksudnya, segenap ASN yang bekerja di Kementerian Agama perlu memiliki sifat jujur (shiddiq) dalam arti yang sebenar-benarnya dan seluas-luasnya. Dengan kejujuran maka segenap tugas dan tanggung jawab akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan selurus-lurusnya sesuai dengan pedoman tufoksi yang sudah digariskan oleh instansi atau satuan kerjanya masing-masing. Sifat tidak jujur apa pun jenisnya harus dihindari sejauh-jauhnya, meskipun tidak diketahui oleh atasan dan hanya diketahui oleh ASN itu sendiri.

Kedua, segenap ASN



perlu memiliki sifat amanah, terpercaya, sehingga apa pun tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Ketiga, tabligh, segenap ASN dapat melaksanakan tugas sesuai dengan pedoman dan dapat mencapai sasaran yang dituju, yaitu masyarakat. Di sinilah berlaku beberapa prinsip kinerja yang dikehendaki oleh reformasi birokrasi, diantaranya pelayanan mudah, cepat dan sesuai dengan target kualitas dan kuantitas yang dikehendaki. Nabi SAW berpesan, agar dalam setiap urusan harus dipermudah jangan dipersulit, dan agar orang yang berhubungan dengan kita merasa nyaman, gembira, tidak merasa takut dan akhirnya menjauh.

Keempat, segenap ASN harus memiliki sifat fathonah (cerdas). Kecerdasan ini berkaitan dengan kompetensi, keahlian atau skill. Para ahli manajemen sumber daya manusia menggariskan, skill yang perlu dimiliki oleh orang-orang yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang

berkaitan dengan publik atau kepentingan orang banyak mencakup: conceptual skill, human skill dan technical skill. Conceptual skill, berkaitan dengan keahlian dari segi konsep, pemikiran, ide atau gagasan. Semakin tinggi jabatan seseorang ASN, terlebih mereka yang sudah memegang suatu jabatan (top management level), maka semakin dituntut keahliannya dari segi conceptual skill ini.

Human skill merupakan keterampilan dalam berhubungan, menjalin komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat pada umumnya. Biasanya suatu lembaga, terlebih Kementerian Agama, memiliki keterbatasan SDM, dana, sarana dan prasarana, karena itu dibutuhkan bantuan dan partisipasi dan lembaga lain serta masyarakat. Karena itu untuk suksesnya suatu program atau kegiatan sangat dibutuhkan dukungan tersebut, dan disinilah urgensinya ASN yang memiliki human skill yang handal. Keterampilan

ini dibutuhkan terutama pada tingkat top management dan middle management (pegawai menengah).

Technical skill merupakan keterampilan teknik dalam menjalankan tugas. Di era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), banyak sekali peralatan teknis yang dapat dijadikan sarana untuk memudahkan, memperlancar dan mempercepat pelaksanaan tugas, hingga pelaporan dan publikasinya. Di sinilah perlunya ASN, terutama kalangan menengah hingga bawahan memiliki keahlian teknis sehingga tugas yang diembannya dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Jika semua keahlian di atas didasari dengan karakter atau akhlak islami yang kuat, maka dapat dipastikan ASN akan dapat mengemban tugasnya dengan baik, sukses dan selamat, dari awal karier sampai masa purnabakti. Ia tidak saja beroleh reward dunia berupa gaji dan tunjangan jabatan semakin meningkat, tetapi juga beroleh reward akhirat berupa pahala dan ganjaran surga. Amin.



Jika semua keahlian didasari dengan karakter atau akhlak islami yang kuat, maka dapat dipastikan ASN akan dapat mengemban tugasnya dengan baik, sukses dan selamat, dari awal karier sampai masa purnabakti.

# Mengenal Karakter ASN Menurut Ajaran Hindu

Oleh : Drs. Made Budiarsa



**A**paratur Sipil Negara (ASN) adalah merupakan pegawai yang bekerja di Instansi Pemerintah dan diangkat oleh Negara serta bekerja sesuai dengan peraturan perundang - undangan ataupun peraturan - peraturan Pemerintah lainnya yang masih berlaku sebagai pedoman dalam menjalankan tugas.

Sebagai Abdi Negara yang diangkat oleh pemerintah ASN hendaknya dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana yang telah di

tetapkan oleh pemerintah dan menghindari perbuatan - perbuatan tercela yang dapat menyebabkan runtuhnya nama baik diri sendiri maupun Instansi tempatnya bekerja.

Aparat pemerintahan hendaknya orang - orang yang menjauhi permusuhan, menghukum pelaku kejahatan, mewujudkan pemerintahan (negara) yang demokratis (yang berkedaulatan rakyat), pemilihan pemimpin secara demokratis (rakyat yang memilih pemimpin). Pengawasan kepada Kementerian/Departemen, memberi perlindungan.

Pemerintah juga menegakkan peraturan bagi cendekiawan, bagi para pedagang, memberikan penghormatan kepada bangsa dalam rangka mewujudkan kemakmuran. Kemerdekaan di peroleh melalui perjuangan. (I Made Titib, Weda sabda suci pedoman praktis kehidupan, Paramita, Surabaya, 2003, hal. 479-480)

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, para ASN sebagai abdi Negara wajib memiliki sifat - sifat sebagaimana wejangan yang di berikan oleh Mpu Prapanca kepada Maha Patih Gajah

Mada yang di kenal dengan istilah “Panca Dasa Pramiteng Prabhu” yang meliputi :

1. Wijaya artinya berlaku bijaksana, penuh hikmah dalam menghadapi masalah;
2. Mantriwira artinya bersifat pemberani dalam membela negara;
3. Wijaksanengnaya artinya sangat bijaksana;
4. Natanggwan artinya mendapat kepercayaan dari rakyat;
5. Satyabhakti aprabhu artinya selalu setia dan taat pada atasan;
6. Wakmiwak artinya pandai berbicara baik di depan umum maupun diplomasi;
7. Sarjawaupawasa artinya bersifat sabar dan rendah hati;

8. Dhirotsaha artinya bersifat teguh hati;
9. Teulelana artinya bersifat teguh iman, selalu riang atau optimis dan antusias;
10. Dibyacita artinya bersifat lapang dada atau toleransi dan selalu menghargai pendapat orang lain;
11. Tansatresna artinya tidak terikat pada kepentingan golongan / pribadi yang bertentangan dengan kepentingan umum;
12. Masihsatresnabhuaa artinya bersifat menyayangi isi alam;
13. Ginengpratidina artinya setiap hari berusaha berbut baik dan selalu berusaha tidak mengulangi perbuatan perbuatan buruk;
14. Sumantri artinya bersifat menjadi abdi negaara;
15. Anayakenmusuh aartinya

mampu membersihkan musuh – musuh negara.

Memang agak susah untuk melaksanakan semua itu secara utuh dan sempurna, namun sebagai ASN Kementerian Agama yang dianggap oleh masyarakat berpakaian serba putih hendaknya dapat menjaga suara hati nurani yang merupakan suara kebenaran agar tidak mengotori pakaiannya sendiri dengan berbuat yang tidak menyenangkan seperti mengadu domba, memfitnah, menyombongkan diri, menganggap diri selalu benar dan senantiasa menyalahkan orang lain serta hal - hal negatif lainnya sehingga tetap tampak putih dan bersih di pandang oleh masyarakat.

Khusus untuk para ASN

Sebagai ASN Kementerian Agama yang dianggap oleh masyarakat berpakaian serba putih hendaknya dapat menjaga suara hati nurani yang merupakan suara kebenaran agar tidak mengotori pakaiannya sendiri dengan berbuat yang tidak menyenangkan seperti mengadu domba, memfitnah, menyombongkan diri, menganggap diri selalu benar dan senantiasa menyalahkan orang lain serta hal - hal negatif lainnya sehingga tetap tampak putih dan bersih di pandang oleh masyarakat.





**ASN Kementerian Agama setidak - tidaknya mampu memiliki sikap "Tri Parartha" yakni tiga sifat yang dapat menimbulkan kebaikan hidup, antara lain ASIH, PUNYA dan BHAKTI**

yang berprofesi sebagai Penyuluh Agama hendaknya senantiasa dapat menjadi suluh / obor penerang bagi yang membutuhkan sehingga dapat memberikan penerangan kebaikan yang dapat menyejukkan hati sehingga dapat menimbulkan kedamaian di masyarakat.

Untuk para pendidik hendaknya dapat bersifat baik dan mulia sehingga dapat senantiasa digugu dan di tiru oleh para siswanya karena keteladannya dalam berfikir, berkata dan berbuat yang senantiasa mencerminkan kemuliaan dan kebaikan sehingga dapat menyebabkan nama harum untuk dirinya dan instansi tempatnya mengabdikan

Bagi ASN yang bernasib baik menjadi Kepala Sekolah dalam ajaran Veda secara tegas dinyatakan :

"Kepala Sekolah hendaknya menjadi contoh dalam kemuliaan moralitas, keras dan adil seperti Yama dan Varuna, mendorong semangat hidup seperti Soma, sumber pengetahuan, mengembangkan keingintahuan, menanamkan pengetahuan, disiplin dan kepatuhan". (I Made Titib, Weda sabda suci pedoman praktis kehidupan, Paramita, Surabaya, 2003, hal. 429).

Oleh karen itulah, ASN Kementerian Agama setidak - tidaknya mampu memiliki sikap "Tri Parartha" yakni tiga sifat yang dapat menimbulkan kebaikan hidup, antara lain :

1. Asih yaitu selalu mengasihi menghormati dan menghargai orang lain agar dapat menumbuhkan sifat asah, asih dan asuh untuk dapat menjaga keharmonisan hidup bermasyarakat, berbangsa

2. dan bernegara; Punya yaitu selalu bersifat belas kasihan kepada orang lain dengan cara memberikan dana (sedekah) kepada orang yang memerlukan dengan hati yang tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun;
3. Bhakti yaitu senantiasa memuja Tuhan dan memasrahkan diri dan hati sepenuhnya kepadaNya, selalu berusaha untuk menjaga kebaikan dan persahabatan sampai munculnya suara hati yang menyatakan bahwa semua mahluk adalah sama sehingga kita wajib untuk menghormatinya.

Demikianlah pandangan Hindu tentang Karakter yang mesti dimiliki oleh ASN agar dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan sebagai kesepakatan bersama.

# ASN Menyongsong Era 4.0

Oleh : H. Najwan Noor



**P**er k e m b a n g a n Revolusi Industri 4.0 saat ini sedang gencargencarnya menjadi topik hangat. Hal tersebut menuntut para Aparatur Sipil Negara (ASN) juga harus turut serta menanggapi revolusi industri 4.0 dan tidak bisa dipungkiri pemerintah harus memiliki strategi jitu untuk mempersiapkan para ASN agar siap mengikuti perkembangan ini.

Arus revolusi industri 4.0 yang masuk dalam ranah digital, termasuk pada sistem pemerintahan mengharuskan setiap ASN untuk adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien.

Digitalisasi birokrasi untuk pelayanan yang optimal, adalah hal yang tidak bisa disanggah

bagi para ASN sebagai pilar birokrasi, dan harus ditanggapi dengan meningkatkan keterampilan diri dan tetap menjunjung tinggi rasa nasionalisme.

Penting bagi para ASN untuk mengembangkan diri, bersikap kritis, dan berinovasi agar mampu menyeimbangkan diri dengan perkembangan global, karena tugas bagi para ASN untuk melayani masyarakat di masa mendatang tidaklah mudah, para ASN perlu memiliki kemahiran dalam menghadapi era Industri 4.0 terutama dibidang teknologi.

Perkembangan Revolusi Industri semacam ini adalah kekuatan eksternal untuk perubahan dalam dunia manajemen ASN yang melibatkan koordinasi dan pengawasan kinerja ASN agar

pekerjaan dapat selesai secara efisien dan efektif.

Perubahan eksternal ini terdiri dari pola kebutuhan masyarakat yang berubah, peraturan baru dari pemerintah, teknologi yang berkembang pesat, dan perubahan ekonomi yang sudah terlihat jelas dengan adanya Revolusi Industri 4.0.

Menyongsong era industri 4.0 di berbagai lini kehidupan tersebut, ASN memerlukan spesialis keahlian dan melek teknologi, karenanya pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memiliki program enam poin fokus perbaikan manajemen ASN menuju Smart ASN 2024.

Pertama, perencanaan ASN di seluruh K/L/Pemda, harus didasarkan pada arah



Arus revolusi industri 4.0 yang masuk dalam ranah digital, termasuk pada sistem pemerintahan mengharuskan setiap ASN untuk adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien.

## "Dalam rangka Menyongsong era industri 4.0 di berbagai lini kehidupan, ASN memerlukan spesialis keahlian dan melek teknologi"

pembangunan nasional dan potensi daerah dengan mempertimbangkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Saat ini pemerintah telah menerapkan digitalisasi perencanaan ASN melalui aplikasi e-formasi untuk mengetahui gambaran struktur organisasi, peta jabatan, jumlah pegawai yang ada, jumlah pegawai yang dibutuhkan dan jumlah kekurangan/kelebihan pegawai di K/L/Pemda.

Kedua, rekrutmen para abdi negara yang harus berbasis komputer. Saat ini, sistem rekrutmen memang sudah menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan hasil real time untuk seleksi Kompetensi Dasar (SKD), kemudian ditambah Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) yang diharapkan benar-benar

mampu merekrut ASN yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan formasi yang diperlukan.

Ketiga, pengembangan kompetensi bagi para ASN. Saat ini, Kementerian PANRB bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) terus melakukan penyempurnaan terhadap sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dengan melakukan proses transformasi diklat konvensional menjadi diklat berbasis Human Capital Management yaitu pelatihan terpadu yang menggunakan kompetensi sebagai basis pengembangan ASN di organisasi.

Pemerintah juga sedang mendesain sebuah kebijakan terobosan untuk mengakselerasi peningkatan kompetensi ASN melalui pengembangan ASN

Corporate University yang merupakan sebuah model pengembangan kompetensi yang diadopsi dari sektor korporasi yang memandang pegawai atau karyawan bukan sebagai beban perusahaan, tetapi sebagai asset investasi yang harus dikelola dan dikembangkan untuk optimalisasi dan pengembangan perusahaan.

Keempat adalah penilaian kinerja dilakukan sebagai dasar pemberian remunerasi dan penghargaan. Penilaian Kinerja dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku ASN.

Kelima untuk memperbaiki sistem manajemen ASN adalah memperbaiki sistem



<https://zi.tipidkorpri.info/wp-content/uploads/2017/04/manajemen-perubahan-ZI.jpg>

## ASN harus berani **BERUBAH**

dan merubah  
**BUDAYA KERJA** dari pegawai yang  
**DIGERAKAN** oleh  
**ATURAN**, menjadi model  
**SDM INVESTATIF**

yang berorientasi kepada  
**KINERJA** agar bisa menjadi

**SMART ASN** yang mampu menggiring sistem pemerintahan Indonesia ke  
**BIROKRASI 4.0**, yang tentu beriringan dengan **REVOLUSI INDUSTRI 4.0**

rotasi, promosi, dan karir yang harus berbasis sistem merit dengan memperhatikan kebutuhan nasional berdasarkan talent pool.

Saat ini pemerintah telah melakukan asesmen sebagai dasar pertimbangan rotasi, promosi, dan karir ASN yang dilakukan secara bertahap dan diharapkan kedepannya bisa dilakukan kepada semua ASN.

Sistem merit adalah seperangkat kebijakan dan manajemen ASN yang berpijak pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dikemas untuk tujuan keadilan dan kewajaran terhadap sistem kerja ASN. Maksud dari konsep ini agar kinerja ASN bisa optimal karena bidang yang dioperasikan sesuai dengan kompetensinya.

Konsep ini juga selaras dengan target reformasi

birokrasi yang menginginkan sistem pemerintahan yang lugas dan melayani. Sehingga keberpihakan pemerintah bisa betul-betul dirasakan masyarakat, baik sebagai konsumen ataupun sebagai pelaku usaha.

Keenam dengan memperbaiki sistem pensiun dengan rasio manfaat yang layak, didanai secara penuh (Fully Funded) oleh lembaga pengelola pensiun, serta iuran bersama antara ASN dan pemerintah.

Dengan enam poin fokus perbaikan tersebut diharapkan Smart ASN yang mampu menghadapi era disrupsi dan tantangan dunia yang semakin kompleks bisa disiapkan, karena nantinya semua jenis layanan publik yang diselenggarakan pemerintah akan berbasis digital

dan terintegrasi.

Percepatan layanan, efisiensi layanan, akurasi layanan, dan fleksibilitas kerja menjadi indikator birokrasi era 4.0 dan dengan fleksibilitas waktu kerja ASN, pekerjaan tidak harus dikerjakan di kantor. Di masa mendatang, beberapa pekerjaan bisa dikerjakan melalui smartphone, yang tentunya akan lebih efisien dan memperpendek alur birokrasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka ASN harus berani berubah dan merubah budaya kerja dari pegawai yang digerakkan oleh aturan, menjadi model SDM Investatif yang berorientasi kepada kinerja agar bisa menjadi Smart ASN yang mampu menggiring sistem pemerintahan Indonesia ke birokrasi 4.0, yang tentu beriringan dengan revolusi industri 4.0.

# Pengembangan ASN Untuk Penyempurnaan Administrasi Barang Milik Negara

Oleh : H. Said Muhdari

Sesuai dengan KMA Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan Penghapusan dan Pemindah Tanganan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Agama, maka dari itu perlu kita lakukan pembenahan untuk meningkatkan Kompetensi dan Pengembangan Karakter Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Sub Bagian Umum Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) serta Sub Bagian Tata Usaha dan Madrasah di lingkungan Kemenag Kabupaten dan Kota se Kalimantan Selatan (Kalsel).

Dalam rangka untuk penyempurnaan administrasi pengelolaan BMN di lingkungan Kanwil Kemenag Kalsel perlu adanya pedoman sebagai acuan untuk mewujudkan penyempurnaan administrasi BMN dalam penggunaan, penetapan status pengguna, pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan secara efektif dan efisien dengan berpegang teguh pada prinsip yang tidak merugikan keuangan Negara dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyempurnakan administrasi diperlukan pengembangan ASN dengan beberapa jenjang baik pendidikan, diklat maupun pelatihan sehingga dapat menyempurnakan administrasi

dan

sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dengan berpedoman yang meliputi antara lain :

1. Penggunaan BMN;
2. Pemanfaatan BMN;
3. Penghapusan BMN;
4. Pemindah Tanganan BMN.

1. BMN semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi tanah, bangunan dan selain tanah dan atau bangunan.

Pengguna barang adalah Menteri Agama dalam hal ini adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang, sedangkan Kuasa



Pengguna Barang (KPB) adalah kepala satuan atau pejabat yang di tunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik baiknya.

2. Pemanfaatan BMN adalah pendayagunaan BMN yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan tidak merubah kepemilikan. Sewa adalah pemanfaatan BMN oleh pihak lain

dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tertentu berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.

3. Penghapusan adalah tindakan penghapusan BMN dari daftar dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna barang dan atau KPB dan atau pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

4. Pemindah Tangan adalah pengalihan ke pemilikan BMN sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara menjual, di pertukarkan, di hibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.

- Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN atau daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

- Tukar  
menukar  
adalah

pengalihan kepemilikan BMN atau daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antara pemerintah pusat / pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.

- Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah pusat atau daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

Maka dari itu untuk  
menangani ruang lingkup

## Perlunya Jabatan Fungsional BMN bagi ASN untuk mempelajari secara khusus dan mengetahui secara detail tata cara pengelolaan administrasi BMN

pedoman-pedoman tersebut seorang ASN harus melakukan pengembangan dengan melakukan pendidikan dan pelatihan ataupun melakukan diklat khusus sebagai Jabatan Fungsional BMN sehingga penanganan administrasinya dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna.

Karena penanganan BMN sangat pelik sehingga ASN yang menangani harus mengetahui secara detail pedoman-pedoman tersebut.

Perlunya Jabatan Fungsional BMN bagi ASN untuk mempelajari secara khusus dan mengetahui secara detail tata cara pengelolaan administrasi BMN disamping itu juga bahwa Jabatan Fungsional BMN merupakan pekerjaan yang dilakukan secara rutinitas bukan sebagai pekerjaan tambahan untuk menangani administrasi BMN.

Jabatan Fungsional BMN bagi ASN akan meningkatkan kinerja, sehingga dapat melakukan pengelolaan administrasi BMN dengan rapi sesuai aturan dan administrasi jadi sempurna.

*"Jabatan Fungsional BMN bagi ASN akan meningkatkan kinerja, sehingga dapat melakukan pengelolaan administrasi BMN dengan rapi sesuai aturan dan administrasi jadi sempurna"*

# Aparatur Kementerian Agama Setia dan Taat Dengan NKRI

Oleh : H. Muchlis Ridhani

Agama hadir agar kita tetap mampu menjaga kemanusiaan, mampu menjaga agar harkat dan derajat terjaga dengan baik. Semua agama membawa pesan inti kedamaian, hidup rukun dan saling menebar kasih.

Agama menjadi nafas yang memberikan panduan moral dan etika bagi Indonesia, sekaligus menyatu ke dalam gerak kehidupan bersama warganya yang hidup dalam sebuah negara yang berlandaskan Pancasila. Indonesia bukan negara agama dan juga bukan negara yang sekuler. Indonesia adalah negara Pancasila. Semua penganut agama dilindungi dan diberikan kebebasan untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing.

Agama adalah bagian dari hak asasi manusia, namun dalam pengamalannya dibatasi oleh aturan-aturan tentang penyalahgunaan dan penodaan agama, bukan untuk membatasi atau mengatur akidah atau keyakinannya.

Agama yang disampaikan tidak boleh dijadikan alat untuk kepentingan politik pragmatisme saja, sehingga berpotensi menyebabkan perpecahan di tengah masyarakat. Di sini dituntut kearifan menyampaikan pesan-pesan agama yang esensial dan substansial.

Jangan menggunakan agama untuk hal-hal yang justru melahirkan destruktif. Sebab agama itu hakikatnya konstruktif dan membangun.

Dalam konteks masyarakat yang majemuk dan beragam, setiap umat beragama harus mengedepankan sisi-sisi positif agama yang ada dalam esensi dan substansi ajaran agama itu sendiri.

Kita tidak boleh terjebak karena perbedaan yang sifatnya hanya permukaan dan kulitnya saja, kemudian kita saling merendahkan satu dengan yang lainnya. Agama hadir bukan untuk memecah belah umat melainkan justru menyatukan umat.

Kementerian Agama mendorong moderasi beragama. Moderasi beragama dimaksud adalah mengedepankan agama sesuai fungsinya yang konstruktif. Agama itu membangun dan memanusiakan manusia.

Paham dan pengamalan keagamaan yang hidup di Indonesia sejak ratusan tahun adalah paham moderat, tidak ekstrim kanan maupun kiri. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membangun kesadaran bahwa beragama



Aparatur  
Kementerian Agama  
haruslah selalu setia dan  
taat dengan NKRI.

Sebagai bagian  
pemerintahan, sudah  
semestinya menjadi agen  
dalam menjaga keutuhan  
NKRI dan menyebarkan  
esensi agama sebenarnya  
yakni damai.



hakikatnya ber-Indonesia dan sebaliknya ber-Indonesia hakikatnya beragama. Seseorang yang mengamalkan ajaran agama, maka sebenarnya dia juga menjaga Indonesia, sebab Indonesia adalah bangsa yang sangat agamis.

Kita selalu menebarkan Islam sebagai ajaran agama yang rahmatan lil alamin, yang berpahamkan ahlussunah wal jamaah. Islam wasathiyah, Islam yang mengajak kepada kedamaian, kerukunan, dengan cara bertoleransi, dengan cara mengembangkan hal-hal yang terkait dengan tasammuh, tawazzun, tawassuth, moderasi, inklusifitas dan sebagainya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah konsensus yang sudah disepakati dan final. Kita semua sudah meyakini model inilah yang terbaik bagi bangsa ini. Pancasila adalah dasar negara yang sudah kita yakini membuat negara ini berdiri, aman dan damai walaupun terdiri dari banyak suku, agama dan ras yang berbeda. Karena itulah kita tidak akan bermain-main

dengan ideologi baru yang belum tentu akan membuat kita tetap bersatu, aman dan damai.

Akhir-akhir ini istilah radikal yang kemudian dikaitkan dengan Islam menjadi topik yang hangat dibicarakan. Hal ini karena beberapa peristiwa pemboman yang melibatkan umat Islam. Peristiwa-peristiwa tersebut dikaitkan dengan umat Islam sebagai salah satu upaya jihad memerangi hegemoni negara-negara barat yang dianggap sebagai representasi kaum kafir.

Kenyataan itu menyebabkan sekelompok umat Islam melakukan "perlawanan" yang bersifat anarkis yang kemudian diidentifikasi sebagai gerakan radikal. Walaupun tidak memiliki pola yang seragam, kelompok-kelompok tersebut memiliki benang merah yang sama, yakni implementasi syariat Islam yang kemudian menimbulkan dua kelompok yang berbeda; pertama, implementasi syariat Islam dengan mendirikan negara Islam, dan yang kedua implementasi syariat Islam

tanpa harus mendirikan negara Islam.

Pendirian negara Islam merupakan sebuah isu yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena terkandung keinginan mendirikan negara baru yang berarti menggulingkan NKRI, bahkan dengan cara-cara kekerasan sekalipun.

Pandangan-pandangan radikalisme ini tentu tidak sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Nilai toleransi, kerjasama, saling menghargai perbedaan dan menerima keragaman adalah nilai-nilai masyarakat yang melandasi berdirinya negara ini. Sementara sikap dan pandangan radikalisme akan menghancurkan nilai-nilai tersebut dan menjadi ancaman bagi integrasi bangsa.

Aparatur Kementerian Agama haruslah selalu setia dan taat dengan NKRI. Sebagai bagian pemerintahan, sudah semestinya menjadi agen dalam menjaga keutuhan NKRI dan menyebarkan esensi agama sebenarnya yakni damai.



# Transformasi Karakter Humas

Oleh : Rajudin

Kemajuan teknologi, perkembangan penduduk dengan tren kebutuhan soft skills yang berbeda dari era sebelumnya, kompetisi fiskal dan tenaga kerja yang ketat, serta semakin tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja birokrasi, merupakan sederet tantangan saat ini yang tidak bisa dianggap remeh. Karenanya dibutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berkarakter.

Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi

pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

ASN Sebagai aparat birokrasi harus dapat bersikap dan berperilaku seperti yang diinginkan masyarakat, yaitu pemberian pelayanan publik yang mudah, murah, cepat, tepat waktu, serta tidak berbelit-belit (Dwiyanto et.al., 2006:235). Oleh karena

itu, perlu adanya perubahan orientasi, cara berpikir, dan bertindak dari seluruh aparat birokrasi dalam menghadapi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang dinamis.

Kehadiran ASN sebagai pelayan publik dituntut agar dapat menyesuaikan dengan kondisi kehidupan masyarakat kekinian yang telah banyak mengalami perubahan terutama dalam perilaku sosial yang salah satunya disebabkan karena modernisasi yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan berpikir lebih

maju, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pula yang membentuk transformasi dalam komunikasi publik.

Teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini tidak lepas dari peranan internet yang telah menghasilkan perubahan drastis dalam tata kelola humas dan pola komunikasi masyarakat.

Pemahaman konvensional yang membahas tentang humas pemerintah sebagai profesi yang berkutat dengan pembuatan pers rilis, peliputan dokumentasi, publikasi majalah internal dan pemantauan serta analisis pemberitaan serta kegiatan rutin lainnya dengan pola-pola konvensional harus segera dirubah.

Pemanfaatan media sosial sebagai teknologi saat ini sudah menjadi keniscayaan, sebagai

saluran yang membantu dalam diseminasi yang perlu terus dilakukan dengan konten-konten yang kreatif ditengah mengubah pola komunikasi dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan kebutuhan informasi yang meningkat.

Sehingga peran strategis pemanfaatan media sosial oleh humas pemerintah menjadi jawabannya. Dengan menggunakan internet sebagai media baru telah membawa perpindahan karakter publik dari obyek pasif menjadi penghasil informasi (Prosumer).

Masyarakat sebagai publik tidak lagi hanya sekedar dapat mengumpulkan berita dan menyusun opini publik melalui platform media sosial. Melalui media sosial yang memungkinkan pengguna

berbagi dan berkomunikasi yang menghubungkan sosial dengan virtual dalam masyarakat jejaring (jejaring masyarakat) yang ditandai dengan jurnalisme warga (citizen journalism).

Kondisi ini membuat Humas pemerintah harus aktif dalam domain digital sehingga tidak lagi menggunakan domain fisik dengan membangun sistem informasi yang mengotomatisasi berbagai kegiatan rutin manusia, sehingga interaksi humas pemerintah dapat lebih fokus pada kegiatan yang strategis dan humanis

Sosok humas pemerintah dituntut memiliki keahlian yang lebih kompleks, dengan terus mengupgrade soft skill dan hard skill serta penajaman konten-konten dan optimalisasi penggunaan media komunikasi sosial yang dibutuhkan.



"Pemanfaatan media sosial sebagai teknologi saat ini sudah menjadi keniscayaan, sebagai saluran yang membantu dalam diseminasi yang perlu terus dilakukan dengan konten-konten yang kreatif ditengah mengubah pola komunikasi dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan kebutuhan informasi yang meningkat".

Humas Pemerintah perlu terus bertransformasi dalam menghasilkan konten pemberitaan yang kekinian, berevolusi dengan dukungan pada konten-konten visual, foto, animasi, hal ini agar informasi dapat terserap lebih cepat. Sebab bentuk publikasi yang berperan formal dan kegiatan seremonial kini tidak lagi menarik perhatian masyarakat.

Humas perlu membuat konten-konten yang menarik dan dibagikan menggunakan humanisme lebih banyak lagi. Humas perlu terus meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui aktivitas-aktivitas yang menarik dengan mengedepankan interaksi, seperti kuis, infografis dan videografis atau film berdurasi pendek. Pemahaman yang berfokus pada media sosial

sebagai saluran diseminasi perlu terus ditumbuhkembangkan agar optimal dalam membangun keberhasilan dan kepercayaan masyarakat, dengan terus mengembangkan konten kreatif berbekali kecakapan dan kreatifitas dalam menghasilkan konten-konten yang mudah, menarik, singkat dan unik dengan mengedepankan desain grafis dan visual pola-pola lama narasi teks, pidato, surat edaran dan lainnya yang terkesan membosankan.

#### Langkah Strategis

Humas dituntut untuk review terus mengembangkan kompetensi dan mengubah pola pikir bekerja dari pelayanan teknis semata menjadi praktisi communication public yang berpikir ke depan, bekerja dengan inovatif dan kreatif, berpikir holistik dan lintas sektor

sehingga terjadi transformasi menuju pemerintahan yang berorientasi pada pembangunan lingkungan strategis (pemerintahan yang dinamis).

Oleh karena itu diperlukan rencana aksi kongkrit dalam mendukung keberhasilannya diseminasi informasi dan capaian kerja organisasi pemerintah dengan terus meningkatkan penyiapan konten yang berkualitas mengedepankan kreatifitas dan data serta materi sehingga mendapatkan dukungan dan kepercayaan publik.

Humas seyogyanya terus mentransformasi pola pikir dari kerja biasa menjadi visioner dan kreatif serta inovatif, dengan berusaha meningkatkan media sosial dalam mengakselerasi diseminasinya.

Membangun kolaborasi pada jejaring humas menjadi



salah satu katakunci dalam menjawab tantangan optimalisasi diseminasi komunikasi pemerintah dengan humas sebagai penghubung dan berenergi positif dalam menyukseskan kerja pemerintah.

Humas Pemerintah perlu didukung dalam memberantas hoaks dan ujaran kebencian dengan pemanfaatan media sosial yang optimal.

Melalui media sosial Humas mengambil peran langsung dan memiliki kontribusi yang signifikan dalam memfasilitasi dan menjadi "penyeimbang" dengan ruang publik dengan informasi positif guna mengembangkan optimisme masyarakat sebagai katalisator literasi digital.

Humas pemerintah tidak cukup hanya mengirimkan

informasi saja, cara-cara penyajian dan kemasan komunikasi publik harus pada kemasan kekinian yang menjadi tren dan mudah dicerna, tanpa mengurangi makna substansial dari pesan, model-model penyajian melalui infografis, vblog, animasi serta pemodelan analisis berita dengan teknologi pengkodean realtime dapat dikembangkan untuk dikembangkan.

Kemasan komunikasi publik harus dikelola secara terpadu dengan membangun kolaborasi terkait data dan informasi kebijakan dan program lintas sektor perlu terus dikembangkan melalui data antarmuka sebagai satu data besar yang dapat dihasilkan rujukan bersama.

Ubah pola pikir dari memiliki informasi menjadi berbagi

informasi yang terkait dengan konten komunikasi publik dan beragam aktivitas kehumasan perlu terus digelorakan, konsep berbagi konten, kolaborasi kegiatan, kolaborasi SDM untuk mendapatkan narasi tunggal menjadi satu keniscayaan, hilangkan belenggu dengan pola pikir konvensional, dan sektoral gunakan pola-pola baru dengan inovasi dan kreatifitas sehingga efektifitas dan efisiensi komunikasi publik dapat dicapai.

Semoga dengan Transformasi Karakter Humas akan semakin meningkatkan kualitas dan responsif komunikasi pemerintah dalam mendiseminasikan kerja-kerja pemerintah, guna menciptakan persepsi positif dalam membangun kepercayaan dari masyarakat.



Humas pemerintah tidak cukup hanya mengirimkan informasi saja, cara-cara penyajian dan kemasan komunikasi publik harus pada kemasan kekinian yang menjadi tren dan mudah dicerna, tanpa mengurangi makna substansial dari pesan, model-model penyajian melalui infografis, vblog, animasi serta pemodelan analisis berita dengan teknologi pengkodean realtime dapat dikembangkan untuk dikembangkan

**FOTO KERABAT** Dokumentasi Kegiatan  
Peningkatan Karakter ASN Dilingkungan Kanwil Kemenag Kalsel





# Penjelasan Menag soal Pemekaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama



Jakarta (Kemenag) - Kementerian Agama berencana melakukan pemekaran terhadap Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menjadi tiga unit eselon I. Masing-masing yaitu Direktorat Jenderal Pesantren, Direktorat Jenderal Madrasah, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Agama Islam.

Ide pemekaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama menurut Menag disebabkan Ditjen Pendis saat ini sudah melebihi kapasitas antara penugasan dengan jumlah pegawai. "Pemekaran ini akan memberikan harapan besar bagi pengembangan pendidikan agama Islam di Indonesia," kata Menag Lukman kepada Komisi VIII DPR RI saat Rapat Kerja Bersama Kemenag, Kemensos, Meneg PP dan PA serta Kepala BNPB, di Jakarta, Senin (16/09).

Lebih lanjut, Menag menyampaikan pemekaran ini bertujuan untuk melakukan pengembangan Islam di Indonesia). "Terkait persiapan tiga Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Agama, di internal kami sudah

selesai," tuturnya.

Saat ini menurut Menag, berkas pengajuan pemekaran yang diserahkan, telah berada di meja Kemenpan RB. "Sekarang ada di Kemenpan RB, karena menyangkut kelembagaan. Mudah mudahan tidak ada kendala di sana," jelas Menteri Agama.

Sementara terkait dengan program 5000 Doktor, Menag mengaku siap bila diminta melanjutkan program tersebut. "Meskipun di LPDP itu ada program khusus untuk S2 dan S3, tapi kita merasa ini program unggulan, jadi tetap diteruskan," jelas Menag.

Menanggapi pertanyaan tentang program 5000 Doktor, apakah akan dilanjutkan atau tidak karena serupa dengan program LPDP Kementerian Keuangan, Menag Lukman Saifuddin mengatakan, program 5000 Doktor akan terus dilakukan. "Meskipun di LPDP itu ada program khusus untuk S2 dan S3, tapi kita merasa ini program unggulan, jadi tetap diteruskan," jelas Menag.

# DPR Sahkan UU Tentang Pesantren

Jakarta (Kemenag) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hari ini, Selasa (24/09), mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pesantren menjadi undang-undang.

Proses persetujuan diambil melalui sidang Paripurna Pembicaraan Tingkat II Terhadap RUU Tentang Pesantren. Wakil Ketua DPR yang bertindak sebagai pimpinan sidang paripurna, Fahri Hamzah, sebelumnya meminta persetujuan para anggota yang hadir dalam sidang Paripurna. "Apakah seluruh fraksi setuju RUU Tentang Pesantren dapat disahkan menjadi undang-undang?" tanya Fahri.

Para anggota DPR peserta sidang pun serempak menyatakan setuju. "Setujuu," ucap para peserta sidang.

Pengesahan UU Tentang Pesantren di sidang paripurna ini pun disambut dengan salawat badar dari salah satu Ormas Keagamaan Islam. Tampak hadir dalam sidang paripurna sejumlah pimpinan pondok pesantren, alim ulama, pimpinan ormas keagamaan Islam, Dirjen Pendidikan Islam dan Direktur Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam Kemenag.

Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong dalam sidang Paripurna menyebutkan RUU tentang Pesantren resmi disahkan menjadi Undang-undang setelah melewati proses pembahasan yang panjang antara Komisi VIII DPR dan pemerintah.

Sementara itu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam pendapat akhirnya mengatakan RUU Tentang Pesantren diinisiasi dikarenakan adanya kebutuhan mendesak sebagai suatu

keniscayaan untuk dapat memberikan pengakuan atas independensi penyelenggaraan pesantren berdasarkan kekhasannya dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

"Sekaligus menjadi landasan hukum untuk memberikan afirmasi dan fasilitasi bagi pengembangan pesantren," ujar Menag.

Dikatakan Menag, substansi dalam RUU tentang Pesantren sesungguhnya sudah sangat terbuka dengan perkembangan kelembagaan yang ada serta mengakomodir ragam dan varian pesantren sebagaimana fakta yang ada saat ini.

"Substansi dalam RUU Pesantren juga memberikan pengakuan atas pemenuhan unsur pesantren (arkaanul ma'had) dan ruh pesantren (ruuhul ma'had) sebagai syarat pendirian untuk menjaga kekhasan pesantren," kata Menag.

RUU Pesantren lanjut Menag memberi pengakuan kepada pendidikan pesantren sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional dengan segala kekhasannya.

"Serta pengakuan atas Dewan Masyayikh dan Majelis Masyayikh yang mandiri dan independen dalam pelaksanaan tugasnya dalam rangka penjaminan mutu," tutur Menag.

"Sekali lagi kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPR RI yang terhormat serta segenap pihak yang berkontribusi dalam memberikan perhatian kepada pesantren di Indonesia," kata Menag.

Sidang Paripurna Pembicaraan Tingkat II Terhadap RUU Tentang Pesantren menjadi UU berakhir sekitar pukul 13.50 WIB.



# Dubes RI: Raja Saudi Sebut Penyelenggaraan Haji Indonesia Excellent



Jakarta (Kemenag) - Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegeibril menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan haji Indonesia yang dinyatakan telah sukses dilaksanakan. Hal ini disampaikan Agus pada Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1440H/2019M, di Jakarta.

Menurut Agus, apresiasi ini tak hanya datang dari dirinya, tapi juga dari negara-negara lain. "Bahkan Raja Saudi menyebut penyelenggaraan haji Indonesia excellent. Dengan jumlah jemaah haji terbesar, tetapi semuanya dapat terorganisir dengan baik," ucap Agus, Selasa (08/10).

Ia menuturkan, atas apresiasi tersebut dirinya pun berkesempatan untuk berbicara dihadapan Raja maupun masyarakat Saudi melalui saluran televisi nasional. " Dari 100 Dubes yang ada, hanya Dubes Indonesia yang diberikan kesempatan berbicara selama 11 menit tentang penyelenggaraan haji di TV nasional," tutur Agus.

Saat itu, dihadapan Raja Salman bin Abdul Aziz, Dubes mengungkapkan empat kunci kesuksesan haji yang dimiliki Indonesia.

Pertama, services commitment yang

dimiliki oleh seluruh petugas haji. Mulai dari lini paling atas penyusun kebijakan seperti Menteri dan Dirjen hingga mereka yang bekerja pada tataran operasional atau eksekusi, menurutnya petugas haji Indonesia memiliki komitmen untuk melayani.

Kedua, kerja di bawah satu komando. "Mulai dari persiapan hingga pelaksanaan seluruh petugas haji Indonesia bekerja dalam satu komando. Di Indonesia, komando ada di Menteri Agama. Di Saudi, komando di tangan Dubes," paparnya.

Ketiga, mengutamakan kebersamaan untuk mencapai tujuan pelayanan. "Petugas Indonesia mendahulukan kekitaan dibandingkan kepentingan lainnya," kata Agus.

Saat penyelenggaraan ibadah haji, utamanya saat masa operasional, menurut Agus tidak ada lagi segmentasi tiap-tiap kementerian/ lembaga. Semuanya melebur menjadi Indonesia. "Itu mengutamakan kekitaan," kata Agus.

Keempat, menurutnya seluruh petugas haji Indonesia memiliki komitmen untuk memberikan layanan yang istimewa bagi seluruh jemaah haji Indonesia. "Jadi layanan yang diberikan selaku yang terbaik, yang istimewa," kata Agus.

Sementara Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sendiri memilih untuk menunggu survei Badan Pusat Statistik untuk menyatakan penyelenggaraan haji 1440H/2019M sukses. "Saat ini saya masih menunggu hasil survei yang telah dilakukan secara independen dan objektif oleh Badan Pusat Statistik (BPS)," ujar Menag.

"Namun dari apa yang disampaikan Pak Dubes dan Dirjen PHU adalah amatan umum dari respons jemaah haji kita, setidaknya tahun 2019 tidak lebih buruk dari 2018," katanya.

Menag pun kerap mengingatkan jajarannya, bahwa untuk mencapai kesuksesan penyelenggaraan haji, maka jangan terbang karena pujian dan jangan tumbang karena cacian.

# UU Perkawinan Diundangkan, Kemenag Minta Penghulu Pro Aktif Cegah Perkawinan Anak

Pekanbaru (Kemenag) --- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag, Mohsen meminta penghulu pro aktif mencegah perkawinan anak. Caranya, dengan menolak mencatatkan pernikahan calon pengantin yang masih di bawah umur.

Penegasan ini disampaikan Mohsen terkait telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Regulasi ini mengatur bahwa usia menikah minimum bagi laki-laki dan perempuan menjadi sama, yakni 19 tahun.

"Menurut perubahan UU Perkawinan yang disahkan DPR pada tanggal 16 September 2019 dan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019 itu, penghulu tidak boleh lagi mencatatkan perkawinan di bawah umur 19 tahun, baik calon suami maupun calon istri, kecuali adanya dispensasi dari Pengadilan Agama," ujar Mohsen di hadapan 90 penghulu pada Rapat Koordinasi Kepenghuluan Provinsi Riau, Rabu (16/10) di hotel Grand Zuri Pekanbaru.

Mohsen mengapresiasi para penghulu yang selama ini melaksanakan tugas pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. "Selama ini KUA sudah bekerja dengan baik dengan menolak mencatatkan pernikahan calon pengantin yang di bawah usia 16 tahun sesuai ketentuan karena belum direvisi," pungkas mantan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah ini.

Sebelumnya, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimum menikah bagi laki-laki dan perempuan berbeda. Calon suami bisa dicatatkan perkawinannya jika sudah berusia 19 tahun dengan syarat harus ada izin dari orang tua karena belum berusia 21 tahun. Jika di bawah 19 tahun maka harus ada dispensasi dari pengadilan.

Sedangkan calon pengantin perempuan jika belum berusia 16 tahun maka tidak bisa dicatatkan perkawinannya kecuali ada izin dari orang tua dan dispensasi dari pengadilan. (Insan Khoirul Qolbi)



# Jumat di Vatikan, Menag Salat Berjamaah di Masjid Roma



Vatikan (Kemenag) --- Hari keempat kunjungan kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Vatikan, bertepatan dengan Jumat. Bersama ratusan umat Islam, Menag tunaikan Salat Jumat di Masjid Raya Roma.

"Alhamdulillah, saya bisa Salat Jumat di Masjid Roma yang megah ini. Tadi sebagai khatib dan imam adalah Syeikh Salah Ramadhan Elsayed, lulusan Al Azhar Kairo," terang Menag di Roma, Jumat (04/10).

Usai Salat Jumat, bersama sang Imam, Menag berkeliling meninjau bangunan Masjid Roma. Ikut mendampingi, Adnan Irodat, staf KBRI Roma.

Menag menyapa umat muslim yang juga hadir. Mereka datang dari berbagai negara, selain warganegara Italia. Terakhir, Menag memberikan

plakat cinderamata kepada Imam Masjid.

Masjid Roma adalah masjid terbesar di Eropa. Masjid ini dapat menampung sekitar 12ribu umat. Letaknya di kaki Monte Parioli (Bukit Parioli) di kawasan Acqua Acetosa yang sekaligus berfungsi sebagai Pusat Kebudayaan Islam Italia.

Sejarah mencatat, berdirinya masjid ini membutuhkan waktu yang panjang. Saat berkuasa pada periode 1922-1943, Benito Mussolini pernah berkata. "Tak kan ada Masjid di Roma, selama tak ada Gereja di Mekkah". Kurang lebih 50 tahun setelah kematian Mussolini, akhirnya umat Islam di kota Roma memiliki sebuah masjid yang megah, lengkap dengan menaranya.

Masjid ini diresmikan penggunaannya pada 21 Juni 1995. Adapun perencanaan pembangunannya dilakukan sejak 1974, ketika lahan diperoleh dari Dewan Kota Roma. Saat itu, Raja Faisal dari Arab Saudi ikut melakukan komunikasi dengan Presiden Italia Giovanni Leone (1971-1978).

Pembangun masjid dimulai tahun 1975 sebagaimana tertulis di prasasti marmer yang terpasang di dekat tangga utama masjid. Masjid ini diarsiteki oleh Paolo Portoghesi, Vittorio Gigliotti, Sami Mousawi, dan Nino Tozzo, dengan gaya perpaduan Romawi dan Islam.

Memasuki ruang utama masjid, jamaah akan melewati selasar sepanjang 15 meter dari tangga yang menghubungkan bagian luar dan dalam. Melalui tangga dengan tinggi kurang lebih 2,5m, akan dirasakan detail kemegahan bangunan-bangunan Romawi kuno dengan 16 kubah dan kubah besar di tengah. Bagian atas kubah besar itu dihiasi dengan bulan sabit. Tinggi menara masjid ini sekitar 40 meter yang berbentuk pohon palem "Umat Muslim di Italia sebagian besar berasal dari Maroko, Albania, Senegal, Mesir, Tunisia, Aljazair, Indonesia, dan Italia sendiri," tutur Menag.

"Sebagian besar Imam Masjid berasal dari Al-Azhar Mesir," sambungnya.

# Kemenag akan Usulkan Tahfidz Jadi Program Nasional

Bandar Lampung (Kemenag) --- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama M Nur Kholis Setiawan menyampaikan bahwa pihaknya akan mengusulkan agar tahfidz (menghafal Alquran) menjadi salah satu program nasional.

“Secara bertahap program ini akan menjadi salah satu yang diusulkan menjadi program nasional,” tegas M Nur Kholis Setiawan saat menghadiri acara Wisuda Akbar Tahfizh Alquran di Gedung Serbaguna (GSG) UIN Raden Intan Lampung, Kamis, (17/10).

Sekjen mengapresiasi sejumlah madrasah dan Kanwil Kemenag Lampung yang telah menginisiasi gerakan tahfidz. Alumni Bonn University German ini menaruh harapan kepada 6.351 siswa yang diwisuda tidak berhenti dengan

hafalan saja. Mereka harus dapat memperdalam keilmuan keislamannya untuk mampu menjadi generasi penerus yang pintar sekaligus benar.

Menurut guru besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini, menghafal Alquran memberikan imbas positif terhadap kreativitas nalar, dan menstimulasi kreativitas berpikir.

“Siswa-siswi sejak dini menghafal Alquran, seberapa pun yang mereka mampu, tentu akan membantu meningkatkan prestasi anak-anak di madrasah,” kata M Nur Kholis Setiawan. Wisuda Akbar Tahfizh Alquran di Gedung Serbaguna (GSG) UIN Raden Intan Lampung ini diikuti kurang lebih 93 madrasah negeri dan 723 madrasah swasta yang tersebar di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.



## Bentuk Karakter ASN Melalui Out Bond



Barabai (Kemenag Kalsel) - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Kalsel H. Noor Fahmi mengatakan, jika kegiatan peningkatan pengembangan karakter ASN melalui Out Bond berdampak positif dan dinilai efektif dalam rangka peningkatan kinerja ASN Kanwil Kemenag Kalsel maka tahun akan datang perlu direncanakan untuk dilaksanakan kembali.

"Jika semua peserta merasa senang dan menilai baik terhadap pelaksanaan ini, maka tahun depan kita rencanakan untuk dilaksanakan kembali," kata Fahmi disambut tepukan

meriah dari semua peserta pada pembukaan kegiatan tersebut, Jumat malam (21/06/19).

Fahmi mengharapkan, melalui kegiatan tersebut disamping rekreasi juga dapat memberikan pembelajaran bagi seluruh peserta, seperti belajar dalam pengendalian diri serta menumbuhkan sikap teliti dan kehati hatian serta kerjasama yang baik dalam bekerja.

"Sebenarnya kegiatan seperti ini sudah sering dilaksanakan oleh beberapa provinsi lain, ditempat kita baru pertama kali," katanya.

Tidak perlu jauh jauh keprovinsi lain pelaksanaan kegiatannya, cukup didaerah kita sendiri, sambil meng eksplor obyek wisata yang dimiliki daerah kita sendiri, " tambahnya.

Selanjutnya acara tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan Fakta Integritas oleh pejabat dan JFU dilingkungan Kanwil Kemenag Kalsel.

Usai acara pembukaan, keseruan kegiatan out bond berlanjut dengan pelaksanaan api unggun dan hiburan serta makan malam bersama.

# Bentuk Karakter ASN Melalui Out Bond

Barabai (Kemenag Kalsel)  
- Dalam rangka peningkatan pengembangan karakter ASN, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kalsel menyelaenggarakan kegiatan Out Bond di Objek Wisata Baruh Bunga Hulu Sungai Tengah Barabai, Jumat (21/06/19).

Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Kanwil Kemenag Kalsel H. Muslim yang ikut terlibat dalam beberapa permainan out bond tersebut menganggap, kegiatan tersebut sangat penting dalam rangka membentuk karakter ASN.

Menurut Muslim, sebagai ASN Kemenag kita dituntut untuk dapat maksimal dan terbaik dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, apalagi jika pelayanan tersebut disertai dengan niat ikhlas,

maka akan menjadi nilai pahala tersendiri.

Oleh karenanya Muslim menginginkan kegiatan out bond tersebut dapat diikuti dengan sungguh sungguh sampai dengan selesai. "Manfaatkan momentum ini, selain untuk refresing juga untuk meningkatkan motivasi kita dalam bekerja dengan mengimplementasikan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang didapat melalui out bond ini diantaranya kerjasama tim, kedisiplinan dan konsentrasi serta komunikasi " katanya.

"Melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat mempererat rasa persaudaraan sebagai bagian dari keluarga besar Kementerian Agama Kalsel, " tambahnya.

Pada kegiatan peningkatan karakter yang dilaksanakan 21

sd 22 tersebut, 60 peserta yang semuanya berasal dari Kanwil Kemenag Kalsel diharuskan mengikuti materi dan semua paket permainan yang telah diagendakan oleh panitia dari Sub. Bagian Kepegawaian.

Diantara permainan yang dilaksanakan adalah Alkatras, Permainan Informasi, Bola Labirin, Viramid Gelas, Lintas Merapi, Stic Doble Besar, Bos Berkata dan Tembak Menembak.

Hasbi Instruktur Out Bond, Hasbi menerangkan semua permainan yang ada menuntut kerjasama tim, kedisiplinan, konsentrasi. "Dalam semua permainan, tidak ada istilah sukses atau berhasil sendiri, semua dikerjakan bersama sehingga tidak ada istilah yang lebih dominan dalam keberhasilan," pungkasnya



## Ka.Kankemenag Pinta Penyuluh Tingkatkan Profesionalisme

Banjarmasin (Kemenag Kalsel) - Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka.Kankemenag) Kota Banjarmasin Muhammad Rofi'i, M.Pd.I meminta penyuluh Agama Islam agar meningkatkan pengetahuan di tengah persoalan masyarakat yang semakin dinamik dan beragama.

“Supaya penyuluh bisa memberikan motivasi dan solusi yang sangat diperlukan untuk perkembangan umat,” katanya saat memberikan sambutan pada kegiatan Pembinaan Penyuluh Agama Islam PNS dan Non PNS se Kota Banjarmasin Tahun 2019, Kamis (14/02/19).

Menurut Rofi'i, hasil akhir yang ingin dicapai dari penyuluh agama pada hakikatnya adalah terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki pemahaman agama secara mumpuni yang diaplikasikan

dengan amal perbuatannya yang konsisten disertai kemampuan wawasan pengetahuan multikultural untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai.

“Kalian sebagai lampu penerang di masyarakat, penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip agama dan keberagaman kultur secara otomatis wajib meng up grade pengetahuan dan profesionalisme kerja di tengah dinamika masyarakat yang ada,” ujar Rofi'i.

Peningkatan kemampuan profesionalisme berpikir luas dan kritis, mengakses dan menganalisa informasi di tengah masyarakat, kreatif dan inovatif dalam mengatasi situasi, meningkatkan kemampuan komunikasi dan adaptasi, kerjasama dalam tim, manajemen waktu yang disiplin

dan memegang teguh etika profesi.

Hal-hal tersebut sangat diperlukan dalam dakwah di masyarakat namun bukan hanya itu, sebagai penyuluh juga dituntut membuat dan melaporkan apa yang dijadwalkan dan yang telah dilakukan

“Profesionalisme menuntut laporan yang baik jadi buat laporan yang dikerjakan dengan baik dan tepat waktu,” tutup Rofi'i dikegiatan yang dihadiri 60 orang peserta yang terdiri dari 28 orang penyuluh agama Islam PNS dan 32 orang penyuluh agama Islam Non PNS yang diselenggarakan di aula barakatan Kankemenag kota Banjarmasin.

Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin H.Ahmad Sya'rani,s.Ag.,M.HI pada kesempatan yang sama mengatakan bahan laporan akan dapat diperoleh secara cepat dan tepat apabila telah disiapkan secara terencana, disiplin dan tersimpan rapi

“Bikinlah rencana kegiatan operasional, Jadwal kegiatan bimbingan/penyuluhan juga buku catatan harian untuk menulis rincian kegiatan penyuluhan yang dilakukan setiap hari, meliputi waktu, jenis, materi, sasaran dan hasil penyuluhan terhadap kelompok binaan supaya penyampaian laporan konsultasi dan penyuluhan bisa dilakukan dengan cepat dan baik,” pinta Sya'rani. (Rep/ Ft: Humasbjm)



# Revolusi Mental Kita Mulai Dari Diri Sendiri

Banjarbaru (Kemenag Kalsel) – Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka. Kankemenag) Tanah Laut (Tala) mengatakan, gerakan revolusi mental harus dimulai dari dalam diri sendiri atau masing-masing individu itu sendiri.

Hal tersebut disampaikan usai menghadiri pembukaan pekan kerja nyata gerakan revolusi mental tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (19/09/19) sore di kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Lebih lanjut ditambahkannya, gerakan revolusi mental merupakan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 2016, sebagai

Aparatus Sipil Negara (ASN) sudah semestinya melaksanakan dalam lingkungan kerja. “Sebagai ASN mari kita berusaha untuk merubah pola pikir, dapat menjadi manusia yang lebih berkarakter, merubah cara bersikap dan menerapkan nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila yang merupakan landasan gerakan revolusi mental,” ajaknya.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo dalam sambutannya mengatakan, sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 2016 seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah diminta melaksanakan gerakan revolusi mental secara masif.

“Ada lima program dalam

gerakan ini yakni, pertama gerakan Indonesia Melayani, kedua gerakan Indonesia Tertib, ketiga Indonesia Mandiri, keempat Indonesia Bersatu dan kelima gerakan Indonesia Bersih,” jelasnya.

Diakhir sambutannya Tjahyo Kumolo mengajak semua pihak untuk bersama-sama meningkatkan kualitas SDM melalui instrument gerakan revolusi mental mewujudkan SDM Unggul, Indonesia Maju.

Pekan kerja nyata tersebut dilaksanakan dari 19 s.d 21 September 2019 yang dibuka secara langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Syafrudin yang didampingi Mendagri dan Gubernur Kalsel.



# Revolusi Mental ASN Berbasis Nilai Agama



Martapura (Kemenag Kalsel) – Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka.Kankemenag) Kabupaten Banjar H. Izzuddin mengatakan, perlunya revolusi mental bagi ASN dalam membangun budaya kerja berbasis nilai agama karena sebagai ASN selalu berupaya dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

“Revolusi mental dalam berbagai bentuk pelayanan dan melayani segala urusan yakni dengan memiliki semangat kerja yang baik dan bijaksana,” ujarnya saat

menyampaikan materi revolusi mental pelayanan berbasis nilai agama yang diselenggarakan Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Jum`at (25/01/19) di aula Kemenag.

Menurutnya, revolusi mental bagi ASN setidaknya ada perubahan yang cenderung negatif dan harus diubah menjadi positif dengan ciri budaya kerja yang baik ASN harus peka terhadap pengguna layanan pemangku kepentingan atasan dan bawahan adanya inovasi keberanian mengambil risiko keterbukaan komunikasi dan terciptanya keharmonisan

dalam dalam lingkungan kerja.

“Pelayanan publik yang tepat waktu tepat prosedur merupakan revolusi mental yang banyak dirasakan mamfaatnya oleh pengguna layanan dengan kata lain masyarakat pada umunya,” ungkapnya.

Selanjutnya H. Izzuddin mengingatkan, pentingnya revolusi mental bagi ASN untuk menciptakan kerja yang baik melalui pelayanan berbasis nilai agama untuk dilakukan pada instansi pelaksana administrasi dan madrasah sebagai pelaksana pelayanan tata usaha. (Rep/Ft:Anjay)

# Tertib Administrasi Wujudkan Layanan Berkualitas



Kalsel H. Haris Makki yang membuka dengan resmi mengatakan, kegiatan tersebut dapat meningkatkan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat serta meningkatkan kesadaran warga dalam hal tertib Administrasi dan Kependudukan (Adminduk).

Selain itu disampaikan, kepada seluruh dinas instansi terkait diharapkan dapat meningkatkan sinergitas. “Sinergitas yang baik akan meningkatkan kualitas pelayanan yang baik pula,” ujarnya.

Selanjutnya dikatakannya, sesuai dengan bergerak yang dibangun Gubernur merupakan bentuk kepedulian Gubernur untuk meningkatkan pembangunan di Kalsel sehingga sesuai dengan program, tujuan dan harapan pemerintah.

Narasumber kegiatan tersebut Prof.Dr. Zudan Arif Fakhrollah, SH, MA Dirjen Kependudukan dan Capil Kemendagri mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas prestasi Kalsel yang saat ini sudah mencapai 98% dalam penyelesaian e-KTP yang didorong “Bergerak Bersama” yang digaungkan Gubernur Kalsel.

Peserta kegiatan tersebut pimpinan SKPD terkait baik dari Pemprov. Kalsel maupun dari Kab/Kota se Kalsel, Disdukcapil, Disdik, Dinkes, Kemenag, Dir.RSUD, Perwakilan Camat, dan utusan anak-anak pramuka.

Pelaihari (Kemenag Kalsel) – “Tertib administrasi wujudkan layanan berkualitas,” ujar Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubbag TU) Kementerian Agama (Kemenag) Tanah Laut (Tala) H. Zairin Fanzani usai mengikuti Sosialisasi Peningkatan Perilaku Tertib Administrasi Kependudukan Kamis, (19/09/19) di Aula Balai Pengembangan PAUD dan DIKMAS Kalsel di Banjarbaru.

yang bergerak dalam pelayanan kepada masyarakat diharapkan mampu memberikan contoh dan perilaku tertib administrasi seperti layanan pada Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Kantor Kemenagnya sendiri. “Ini sangat erat hubungannya dengan Disdukcapil dan KUA terkait data calon pengantin yang masuk sehingga akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Selanjutnya dikatakannya, kegiatan “Bergerak Bersama” tersebut mengangkat tema “Wujudkan Peningkatan Perilaku Tertib Adminduk dalam rangka Mendukung Gerakan Nasional Revolusi Mental di Prov. Kalsel”.

Sementara itu Sekda Prov.

Menurutnya, peningkatan perilaku tertib administrasi merupakan bagian upaya dari peningkatan layanan semua pihak khususnya dalam pelayanan publik tak terkecuali juga Kementerian Agama.

Lebih lanjut dijelaskannya, Kemenag sebagai institusi

# Tingkatkan Profesionalitas Hadapi Revolusi Industri 4.0

Tanjung (Kemenag Kalsel) – Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubbag TU) Kementerian Agama (Kemenag) Tabalong H. Sahidul Bakhri, S.Ag menegaskan kepada tenaga didik dan kependidikan agar meningkatkan profesionalisme dan kompetensinya dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 terlebih dengan era persaingan saat ini yang serba digital.

“Sekarang hadir fenomena Revolusi Industri 4.0, sehingga diharapkan para guru meningkatkan profesionalisme, memberikan kesiapan pada peserta didiknya menghadapi persaingan yang semakin digital,” ucapnya Selasa (11/06/19) saat memberikan pembinaan dihadapan guru MTsN 6 Tabalong.

Menurut Sahidul, saat ini semuanya dirancang secara digital bahkan dimadrasah untuk

hasil penilaian siswa tidak lagi manual namun menggunakan Aplikasi Raport Digital (ARD). “Era Revolusi Industri 4.0 ini selain memberikan kesiapan kepada peserta didik, para guru pun perlu meningkatkan kompetensi dan kualitasnya,” terangnya.

Terlebih dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, guru diminta tidak hanya bertugas untuk mentransfer ilmu pengetahuan tetapi harus mampu menanamkan nilai dasar pengembangan karakter peserta didik dalam pemanfaatan kemajuan teknologi informasi secara bijak.

“Diperlukan guru yang profesional, yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang super cepat tersebut untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar pada setiap satuan pendidikan dalam rangka

mempersiapkan SDM yang unggul dengan kompetensi global,” ujarnya.

Pembinaan bagi tenaga didik dan kependidikan di MTsN 6 Tabalong tersebut sekaligus Inspeksi Mendadak (Sidak) atas kepatuhan kehadiran pasca libur panjang usai lebaran. “Kita ingin guru dimadrasah tak menambah jumlah libur dan sebisa mungkin mengefektifkan waktu karena ujian semester genap siswa seketika dilaksanakan tepat ketika siswa masuk sekolah,” ucapnya.

Selain itu diharapkannya, dengan kedisiplinan dan profesionalitas kerja, motto dan spirit Madrasah Hebat dan Bermartabat akan bersinergi dalam Lima Budaya Kerja Kemenag. “Memajukan madrasah, adalah juga memajukan lembaga kementerian Agama,” pungkasnya.



# Hadapi Revolusi Industri 4.0, Ka.Kankemenag Imbau ASN Tingkatkan Kualitas



Banjarmasin (Kemenag Kalsel) - Menghadapi revolusi industri 4.0 yang dibarengi dengan kualitas birokrasi yang unggul, Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka. Kankemenag) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) Drs H. Abdul Basit, MM meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenag Tanbu untuk lebih meningkatkan kualitasnya.

Mau tidak mau, menurut H.Basit ASN harus melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh, meningkatkan kualitas kerja dan tata kelola administrasi.

“Menjaga akuntabilitas,

harus selalu open mind, terus melakukan inovasi, menyederhanakan proses kerja, memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, serta berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait,” katanya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Kamis (25/04/19) di G’Sign Hotel Banjarmasin.

Lebih lanjut orang nomor satu di Kemenag Tanbu itu mengatakan, seiring berjalannya waktu untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin berat. “SDM kita harus mampu menghadapi dan memanfaatkan

peluang dan teknologi yang sedang berubah cepat,” tegasnya.

Dalam hal ini, H. Basit pun mengharapkan kepada seluruh jajaran ASN lingkungan Kemenag Tanbu untuk segera memperkuat diri untuk menjadi agen transformasi penguatan SDM, menjadi agen transformasi dalam membangun talenta-talenta anak bangsa.

“Dengan peran Aparatur Sipil Negara yang ada, saya yakin transformasi kualitas SDM ini bisa dilakukan dan akan memberikan hasil yang positif bagi kemajuan kita semua,” pungkasnya. (Rep: Selamat/ Ft: Amad Tnb)

# Kewajiban ASN Mentaati Segala Ketentuan Peraturan



Kandungan (Kemenag Kalsel) – “Kewajiban Aparatur Sipil Negera (ASN) mentaati segala ketentuan peraturan,” ujar Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka. Kankemenag) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Drs. H. Saribuddin, M.Pd.I pada acara sosialisasi peraturan pemerintah NO 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilaksanakan bagian Kepegawaian Kantor Kemenag kab HSS, Rabu (02/10/19) di aula Kantor Kemenag Kab HSS.

Menurut H. Saribuddin disiplin Pegawai Negeri Sipil dan diatur pasal demi pasal secara lengkap. Disiplin PNS adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau

dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. “Kita sebagai ASN wajib mengikuti peraturan disiplin ASN baik didalam maupun diluar jam kerja,” ucapnya.

Selanjutnya H. Saribuddin berharap sebagai ASN agar melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan martabat PNS serta mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan golongan serta memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara. “Saya berharap dengan kegiatan ini dapat mengingatkan kembali tentang peraturan perundang-undangan disiplin

ASN,” harapnya.

Sementara Panitia pelaksana Salapuddin, S.Sos mengatakan dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan para pegawai khususnya PNS di Kemenag Kab HSS dapat memahami substansi PP. 53 Tahun 2010 secara optimal dan bagaimana prosedur untuk menerapkan peraturan tersebut serta bagaimana memeriksa PNS yang melanggar disiplin sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah.

“Melalui kegiatan ini paling tidak dapat memberikan bekal bagi pejabat serta pegawai di Lingkungan Kemenag HSS dalam menangani masalah disiplin PNS,” jelasnya di kegiatan yang dihadiri Para Kasi dan Penyelenggara serta 70 orang peserta terdiri dari Kepala Madrasah MI, MTs dan MA serta Ketua Pokjawas dan Pokjaluh Kab HSS tersebut

# Peringati Hari Santri, Kemenag HST Gelar Lomba

Barabai (Kemenag Kalsel) – Peringati hari santri ke-4 tahun 2019, Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) melalui Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) menggelar beberapa lomba. Senin (14/10/19) di aula Makhraja.

Kepala Kantor Kemenag HSTH. Saipudin yang membuka kegiatan tersebut memberikan apresiasi kepada panitia dan santri serta semua pimpinan pondok pesantren yang sudah berpartisipasi dengan mengikutsertakan santrinya dalam berbagai perlombaan.

“Diharapkan dengan kegiatan ini kalangan pondok pesantren akan lebih merasa memiliki adanya hari santri yang merupakan kado pemerintah untuk para santri,” ujarnya.

Sementara Kepala Seksi PD Pontren H. Idi Amin dalam laporannya mengatakan 92 santri dari berbagai pondok pesantren yang ada di HST mengikuti lomba Musabaqah Qiraatil Kutub, hutbah Jum'at dan Lomba Mars serta Yalal Wathan.

“Selain tiga lomba tersebut, peringatan hari santri juga akan digelar

Apel Hari Santri, sebagai puncak peringatan hari santri pada tanggal 22 Oktober nanti, peringatan hari santri dimaksudkan untuk mewujudkan santri yang berkualitas dan berkarakter,” katanya.

Lebih lanjut Idi Amin mengatakan peringatan tersebut juga dimaksudkan untuk membangun tradisi di HST. “Bahwa santri sudah memiliki hari tersendiri yang harus kita peringati sebagai syiar dan bukti kalau santri punya peranan penting dalam pendidikan,” katanya.



# Pentingnya Bimtek SKP dan PKG dalam Upaya Pengembangan Diri

Amuntai (MTsN 2 HSU) - Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka. Kankemenag) Kabupaten Hulu Sungai Utara (Kab.HSU) Drs. H. Yusran, MM mengatakan pentingnya kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Kinerja Pegawai (PKG) dalam upaya pengembangan diri bagi para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Hal tersebut disampaikan Ka.Kankemenag saat membuka secara resmi bimtek Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Kinerja Pegawai (PKG) bagi CPNS MTs/MA se-

kab HSU, Jum'at (27/09/19) di aula MTsN 2 HSU.

Lebih lanjut disampaikan, melalui kegiatan tersebut CPNS dapat meningkatkan kompetensi sekaligus persiapan menghadapi Latihan Dasar (Latsar) yang menuntut adanya laporan aktualisasi. "Semua peserta supaya mengikuti sungguh-sungguh terlebih materi yang disampaikan sangat penting untuk meningkatkan potensi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) nanti," sampainya.

Selanjutnya Ka.Kankemenag menegaskan, kegiatan bimtek dapat menambah wa-

wasan dan pengetahuan CPNS untuk terus ditingkatkan dan dikembangkan terlebih materi SKP dan PKG agar program ke depannya lebih baik. "Saya tidak ingin PK-Guru dilakukan seadanya, harus betul-betul dinilai oleh atasan sendiri, tepat sesuai jadwal atau rencana, begitu juga SKP jangan sampai ditunda," tegasnya.

Kepala MTsN 2 HSU Drs. H.Khiran Ali, M.M.Pd menuturkan madrasah memfasilitasi bimtek penyusunan SKP dan PKG terlebih didominasi CPNS dari MTsN 2 HSU. "Para CPNS dapat memanfaatkan kesempatan ini mengembangkan potensi, meningkatkan kualitas diri, tukar pikiran dan pendapat serta sebagai moment saling berbagi pengetahuan dan pengalaman," tuturnya.

Sementara peserta dari MTsN 2 HSU M. Shodiqin, S.Pi menyatakan bimtek penyusunan SKP dan PKG hal yang sangat penting diikuti bagi CPNS sekaligus sebagai upaya pengembangan diri dan memberdayakan potensi terlebih persiapan untuk mengikuti latsar. "Semoga bimtek ini berjalan lancar, tertib, sukses dan kondusif," harapnya.

Kegiatan bimtek yang dipelopori CPNS MTsN 2 HSU dilaksanakan dari 27 s.d 29 September 2019 dan diikuti peserta CPNS yang ada di lingkungan Kemenag HSU berjumlah 43 orang terdiri dari; 30 orang dari MTsN dan 13 orang Madrasah Aliyah Negeri (MAN) yang didominasi peserta dari MTsN 2 HSU sebanyak 22 orang.



# Pospenas Pilar Penting dalam Membangun Pendidikan



Paringin (Kemenag Kalsel) – Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka.Kankemenag) Kabupaten Balangan H. Muhammad Yamani mengatakan, keberadaan Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren (Pospenas) sebagai pilar penting dalam membangun pendidikan tertua di Indonesia yang sarat akan potensi dalam mendidik generasi bangsa.

Lebih H. Yamani mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) agar pengalaman dan kekurangan dalam kegiatan Pospenas bisa dijadikan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan yang akan datang.

“Saya mengapresiasi kepada semua santriwan/santriwati yang telah mengikuti kegiatan tersebut, menang dan kalah hanya bagian dari kompetisi karenanya jangan berkecil hati, jad-

ikan kegiatan ini sebagai ajang evaluasi dan pembelajaran bagi optimalisasi diri kedepan,” ujarnya saat menjadi pembina apel bulanan sekaligus menyerahkan tropi kepada santriwan-santriwati yang berprestasi pada Pospenas tingkat Provinsi, Selasa (15/10/19) di halaman Kankemenag.

Selanjutnya diingatkannya, kepada pemenang selalu jaga sportifitas dan kemampuan sebab para juara ini akan dikirim dan menjadi duta ke Pospenas tingkat Nasional dan kompetisi tingkat nasional nanti membutuhkan persiapan yang mapan sebab persaingan akan lebih tajam, kuat antar kontingen se Indonesia.

“Jangan lupa berdoa sebagai bekal menjaga stabilitas kekuatan pribadi sebagai figure santriwan/santriwati yang selalu berlatih tawadhu, istiqamah agar mampu menjiwai ilmu

yang selama dipelajari untuk bekal di hari nanti,” ucapnya.

Diakhir arahnya disampaikan, hasil kejuaran pertandingan dari cabang Pospenas yang di lombakan antara lain, lari putra/putri 100 M yang berhasil menyumbangkan juara 3 Putra, lari Putra/Putri 200 M yang juga menyumbangkan juara 3 Putra, lari 400 M Putra/Putri yang menyumbangkan juara 3 putra dan juara 2 putri, lari 800 M putra/putri menyumbangkan juara 1 putra dan juara 2 putri dan lari 5.000 M putra menyumbang juara 3.

“Dengan hasil ini diharapkan bagi semua ASN Kemenag Balangan, khususnya Ponpes bisa terus meningkatkan dan mengembangkan potensi-potensi santriwan/santriwati di Balangan supaya tidak hilang dan tetap pada jalur keagamaan, sebab dasarnya adalah Pontren,” pungkasnya.

# Pelayanan Terpadu Isbath Nikah Bantu Masyarakat Kecil

Marabahan (Kemenag Kalsel) – Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka. Kankemenag) Kabupaten Barito Kuala (Kab. Batola) H. Rusbandi mengatakan Pelayanan Terpadu Isbath Nikah membantu masyarakat kecil yang telah menikah, namun belum memiliki akta nikah.

Rusbandi menambahkan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Isbath Nikah selain untuk membantu masyarakat kecil agar mamiliki akta nikah, juga untuk tertibnya administrasi kependudukan, memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas

setiap peristiwa kependudukan.

“Juga peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atau masyarakat di Kab. Batola,” terangya pada acara Penyerahan Produk Pelayanan Terpadu Isbath Nikah yang dilaksanakan Pemerintah Daerah (Pemda) Kab. Batola bekerjasama dengan Pengadilan Agama marabahan dan Kemenag Kab. Batola, Kamis (10/10/19) di Balai Latihan Masyarakat Banjarmasin, Jln. Trans Kalimantan KM. 10 Handil Bakti Kecamatan Alalak, Prov. Kalsel

Turut hadir di acara tersebut Bupati Kab. Batola,

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan (Prov. Kalsel), Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan Keluarga Berencana (KB) Prov. Kalsel.

Kemenag Batola menyerahkan Buku Nikah, sedangkan DisDukcapil menyerahkan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran bagi yang mempunyai anak. Kemudian dari Pengadilan Agama Marabahan menyerahkan hasil sidang Isbath Nikah kepada 31 pasangan suami istri dari berbagai Kecamatan di Kab. Batola.



# Dialog Lintas Agama, Kasubbag TU Harapkan Tokoh Agama Redam Radikalisme

Kotabaru (Kemenag Kalsel) – Kementerian Agama (Kemenag) Kotabaru mengadakan Dialog Lintas Agama dengan Berbagai Kalangan Masyarakat dan Profesi yang di gelar di aula Kankemenag Kotabaru, Kamis (22/08/19).

Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubbag TU) Kankemenag) Kotabaru berharap para Tokoh agama dapat memberikan kesejukan dan dapat meredam paham radikalisme yang dapat mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara, serta dapat menjaga kerukunan, baik antar umat seagama, antar umat beragama maupun antara umat beragama dengan pemerintah.

“Saya mengharapkan kepada seluruh tokoh agama yang berperan penting untuk bisa bersinergi dengan masyarakat, pemerintah dan antartokoh agama lain, supaya bisa menjadi peredam jika terjadi konflik di tengah masyarakat,” ujarnya saat membuka kegiatan.

Ramadhan menambahkan dengan kegiatan dialog, momentum bagi umat beragama dalam mempererat tali silaturahmi dan keberagamaan umat beragama agar semakin kokoh dan maju.

“Keberagamaan beragama dalam menjaga kesatuan dan kesatuan untuk menciptakan keharmonisan hubungan antar agama dan intern umat beragama khususnya di Kabupaten Kotabaru,” tambahnya.



Melalui forum dialog ini, sambungnya bukan mendialogkan agama, karena agama tidak bisa didialogkan. Yang didialogkan adalah bagaimana beragama dengan baik, orang beragama mampu menghormati agama orang lain dan menyepakati apa yang harus dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

“Agama pada hakekatnya pilihan keyakinan yang di berikan kepada setiap individu. Setiap ajaran agama tentu mengajarkan kebaikan, namun berbeda dalam pelaksanaan. Ajaran agama di harapkan mampu menyejukkan semua umatnya,” imbuhnya

Diakhir sambutannya Ramadhan mengajak seluruh tokoh agama untuk dapat menjalankan aktivitas keagamaan dan ibadahnya masing-masing dengan baik, jangan ada perselisihan

apalagi saling menebar isu-isu kebencian.

“Saya ingatkan kepada seluruh tokoh agama yang berperan penting untuk bisa bersinergi dengan masyarakat, pemerintah dan antartokoh agama lain, supaya bisa menjadi peredam jika terjadi konflik di tengah masyarakat,” Ingatnya

Dialog Lintas Agama ini mengambil Tema “ Melalui Dialog Lintas Agama Kita Tingkatkan Peran Tokoh Agama Sebagai Pembantu Dalam Menjaga Kebersamaan Umat” dengan menghadirkan narasumber dari Kantor Kemenag Kotabaru, Kepolisian Resort Kotabaru, Ketua FKUB dan Badan Kesbangpol Kotabaru serta diikuti 40 peserta yang berasal dari tokoh agama lintas agama dan Kepala Desa se Kecamatan Pulau Laut Utara serta ketua pengurus Ormas Keagamaan.



KEMENTERIAN AGAMA  
Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan



[kanwilkalsel@kemenag.go.id](mailto:kanwilkalsel@kemenag.go.id)



[@kemenagkalsel](https://www.instagram.com/kemenagkalsel)



[@kemenagkalsel](https://twitter.com/kemenagkalsel)



[kemenagkalsel](https://www.facebook.com/kemenagkalsel)



[kalselkemenag.go.id](https://www.youtube.com/kalselkemenag)

*Selamat*

**HARI SANTRI NASIONAL**

**22 Oktober 2019**



Ka. Kanwil Kemenag Kalsel  
H. NOOR FAHMI

